



Praktik Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Pelaksanaan Tradisi Festival Kenango di Kabupaten Bangka

Abih Sanjaya¹, Iskandar Zulkarnain², Hidayati³

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung

E-mail: abihsanjaya7@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 29, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

Keywords:

Power and Knowledge,
Governmentality, Kenango
Festival

ABSTRACT

This study aims to understand how to practices of power and local knowledge operate in the implementation of the Kenango Festival tradition in Bangka Regency, using Michel Foucault's theory of governmentality as the main analytical framework. The Kenango Festival is an annual tradition that has undergone changes in its form of implementation and the involvement of key actors, particularly between local government and the community. The findings show that the practice of governmentality in this festival operates through three main mechanism: rules, surveillance, and social responsabilization. These three mechanisms are dialectically related and shape conditions in which the community is encouraged to govern itself based on local knowledge derived form internalized norms and values. This dialectic forms a specific mode of power, in which authority shifts form the control of the local government to a form of self-regulation by the community. The Kenango Festival thus serves as a concrete example of how governmentality functions in local cultural practices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 29, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

Kata Kunci:

Kekuasaan dan Pengetahuan,
Governmentality, Festival
Kenango

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik kekuasaan dan pengetahuan lokal bekerja dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango di Kabupaten Bangka, dengan menggunakan teori governmentality sebagai kerangka analisis. Festival ini merupakan tradisi tahunan yang mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaan dan keterlibatan aktor, terutama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa praktik governmentality berlangsung melalui tiga mekanisme utama: aturan, pengawasan, dan pengalihan tanggung jawab sosial. Ketiganya berdialektika dan membentuk kondisi di mana masyarakat terdorong untuk mengatur diri sendiri berdasarkan pengetahuan lokal yang berangkat dari norma serta nilai yang telah diinternalisasi. Dialektika inilah yang melahirkan praktik kekuasaan, di mana kekuasaan bergeser dari kendali Pemerintah Daerah menjadi bentuk pengaturan mandiri oleh masyarakat. Festival Kenango menjadi contoh konkret bagaimana governmentality bekerja dalam praktik budaya lokal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Abih Sanjaya

Universitas Bangka Belitung

E-mail: abihsanjaya7@gmail.com



PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan kemampuan individu maupun kelompok yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya oleh orang yang memiliki kekuasaan (Robbins dan Judge, 2007). Dalam praktiknya, kekuasaan termasuk dalam suatu ketergantungan yang menghasilkan keberfungsian. Semakin besar ketergantungan pihak yang dikuasai maka akan semakin besar pula kekuatan kuasa dalam hubungan tersebut untuk mengendalikan pihak yang dikuasai. Tindakan maupun pengaruh pihak yang berkuasa dapat menentukan arah suatu kebijakan untuk khalayak umum. Relasi kekuasaan ini pada akhirnya membentuk pola interaksi sosial, di mana pihak yang dominan dapat mengarahkan keputusan kolektif, baik secara langsung maupun melalui pengaruh yang tersembunyi.

Menurut Foucault (1975), dalam bukunya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, kekuasaan selalu hadir sebagai komponen dari kehidupan manusia. Kekuasaan tidak hanya bersumber dari lembaga formal baik Negara maupun institusi, tetapi kekuasaan juga selalu hadir dalam struktur sosial dalam kehidupan manusia seperti: penjara, rumah sakit, sekolah, dan lainnya yang dipengaruhi oleh otoritas lembaga serta kekuatan ekonomi. Sehingga, kekuasaan merupakan mekanisme yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu bentuk kekuasaan terdapat dalam praktik tradisi Festival Kenango. penyelenggaraan tradisi Festival Kenango setiap tahun selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

Adapun bentuk dukungan ini terlihat dari penetapan tradisi Festival Kenango sebagai agenda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka juga menyalurkan dana berjumlah lebih kurang 700-800 juta dalam setiap penyelenggaraan tradisi Festival Kenango. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran aktif dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Menurut ketua adat Kelurahan Kenanga, Salman Saleh mengungkapkan bahwa dana penyelenggaraan tradisi Festival Kenango tidak hanya bersumber dari Pemerintah Daerah, terdapat juga dana swadaya masyarakat Kelurahan Kenanga. Selanjutnya, dana tersebut diperuntukkan mengundang penceramah kondang, serta penyelenggaraan lomba-lomba Islam melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Kolaborasi ini memperlihatkan adanya sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelestarian tradisi. Akan tetapi, perayaan tradisi Festival Kenango yang semulanya diagendakan menjadi perayaan tahunan kini menjadi perayaan dua tahun sekali menimbulkan respon yang beragam di masyarakat Kelurahan Kenanga. Melalui observasi pra-penelitian yang ada, peneliti melihat kondisi ini disebabkan karena tidak adanya dana subsidi penyelenggaraan tradisi Festival Kenango pada tahun 07 Juli 2024 lalu.

Sehingga, pada perayaan tradisi Festival Kenango 2025 masyarakat Kelurahan Kenanga memutuskan untuk tidak lagi wajib mengundang masyarakat umum untuk menyemarakkan festival ini, karena pertimbangan kondisi ekonomi dan skala prioritas kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan melalui beberapa ketua RT yang ada di Kelurahan Kenanga kemudian diteruskan pada ketua Adat 3 Kelurahan Kenanga. Dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Kenanga tidak hanya bersikap reaktif terhadap perubahan, tetapi juga aktif membentuk keputusan berdasarkan nilai kebersamaan yang dijunjung. Dengan adanya



beberapa bentuk kekuasaan dalam penyelenggaraan tradisi Festival Kenango menghasilkan konsep mentalitas, rasionalitas, dan teknik melalui teori governmentality (Foucault, 1977).

Adapun mentalitas merujuk pada cara berpikir masyarakat Kelurahan Kenanga yang mengalami pergeseran dalam memaknai tradisi. Jika sebelumnya tradisi tersebut diposisikan sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan bersama karena sudah menjadi bagian dari budaya turun-temurun, kini masyarakat mulai memaknainya secara lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tidak lagi dianggap sebagai suatu keharusan mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Perubahan pola pikir ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempertimbangkan aspek kebermanfaatan dan situasi aktual sebelum memutuskan untuk melanjutkan, menunda, atau mengubah makna pergeseran tradisi tersebut. Selanjutnya, rasionalitas dalam penelitian ini merujuk pada pertimbangan logis dan strategis yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kenanga dalam merespons ketidakpastian bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah. Walaupun subsidi dari Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya dihentikan, pola pemberiannya yang tidak konsisten, seperti pada tahun 2024 ketika Festival Kenango tidak diberikan dana penyelenggaraan yang diperoleh melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, membuat masyarakat ekstra waspada terhadap realita dalam pengambilan keputusan. Masyarakat akan menilai dirinya sendiri dalam mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi ekonomi yang dihadapi dalam menyelenggarakan tradisi yang telah mengalami pergeseran makna.

Kemudian, teknik merujuk pada cara atau mekanisme yang digunakan oleh masyarakat dalam mengatur pelaksanaan tradisi secara mandiri. Meskipun tradisi Festival Kenango tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk perayaan besar yang melibatkan masyarakat umum untuk meramaikan, Pemerintah Daerah tetap memberikan dukungan setiap tahunnya melalui pemberian dana, meskipun nominalnya tidak tetap sesuai dengan kondisi perekonomian di Bangka. Di tengah keterbatasan yang ada, masyarakat Kelurahan Kenanga tetap melaksanakan inti dari tradisi, seperti ceramah agama, syukuran, dan perlombaan dalam rangka tahun baru Islam yang dikolaborasikan dengan agenda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Lembaga adat Kelurahan Kenanga sendiri memberikan kebebasan kepada masyarakat Kelurahan Kenanga untuk menyelenggarakan perayaan tradisi Festival Kenango setiap tahun maupun setiap dua tahun sekali. Sehingga, saat melakukan observasi pra-penelitian, pada tanggal 07 Juli 2024 atau pada perayaan tahun baru Islam ditemukan hanya sebagian masyarakat Kelurahan Kenanga open house dalam menyelenggarakan tradisi Festival Kenango, dan selebihnya tidak tahu pasti keberadaannya.

Adapun rata-rata masyarakat yang open house untuk mengundang masyarakat umum dalam menyelenggarakan tradisi Festival Kenango ini bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, serta wiraswasta. Oleh karena itu, melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kelurahan Kenanga saat ini tidak memungkinkan untuk mengundang masyarakat umum dalam memeriahkan pelaksanaan tradisi Festival Kenango. Perayaan tradisi yang telah ada 5 sejak tahun 1700-an ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya sehingga telah menjadi ciri khas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Kenanga. Melalui observasi pra-penelitian yang telah ada, peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih tidak mengundang masyarakat umum dalam memeriahkan perayaan tradisi Festival Kenango hal ini berarti bahwa masyarakat sepenuhnya



tidak menolak kebijakan ini diterapkan pada perayaan tradisi Festival Kenango 2025. Perayaan tradisi Festival Kenango merupakan kegiatan perayaan tahun baru Islam yang hanya diselenggarakan di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah mencatat bahwa perayaan tradisi ini awalnya pertemuan antara masyarakat agraris dan pesisir setiap tahun dalam melantunkan rasa syukur atas hasil alam melalui arak-arakan pawai yang diakhiri dengan makan bersama di pendopo. Perayaan ini disemarakkan dengan turut mengundang masyarakat umum untuk bersilaturahmi layaknya perayaan hari fitri dengan berbagai macam pagelaran seni kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kelurahan Kenanga (Rismy; 2023).

Setiap perayaan 1 Muharam, warga Kelurahan Kenanga sejak pagi selalu membawa dulang (makanan yang ditutup dengan tudung saji) ke Masjid AlMu'minin sebagai salah satu tempat sentral di Kelurahan Kenanga. Di dalam dulang tersebut berbagai jenis makanan hadir seperti ketupat daging, rendang, semur, dan lain-lain. Kemudian, masyarakat mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh penceramah kondang terkait topik Muharam dilanjutkan dengan makan bersama. Setiap rumah di Kelurahan Kenanga membawa satu dulang yang merupakan bagian dari salah satu kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 yakni sepintu sedulang atau dengan nama terkenalnya Adat Nganggung (Apriza: 2020). Adapun salah satu makanan ikonik perayaan festival ini ialah adanya kue khas yakni Bolu Kujo. Kue Bolu ini hanya disajikan setiap memperingati perayaan 1 Muharam dan telah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah yang kemudian diajukan sebagai warisan budaya tak benda nasional (Aminah; 2019). Kue Bolu Kujo yang telah mendapatkan Rekor (MURI) Indonesia pada perayaan 1 Muharam 1441 H ini memiliki rasa yang beraneka ragam seperti coklat, pandan, keju, dan durian dengan diameter 275 cm dan ketebalan 5cm.

Melalui keputusan terkait kebijakan pelaksanaan tradisi Festival Kenango mendapatkan respon yang beragam di tengah masyarakat Kelurahan Kenanga. Dalam perspektif sosiologi, adanya kekuasaan dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango berkaitan dengan interaksi antara struktur kekuasaan serta norma-norma sosial yang telah lama terbentuk dan berlaku dalam masyarakat setempat. Adanya penerapan konsep *governmentality* dalam penyelenggaraan perayaan tradisi Festival Kenango mempengaruhi pergeseran makna dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema tradisi budaya lokal umumnya menitikberatkan pada aspek pelestarian, identitas komunitas, serta peran pemerintah atau tokoh adat dalam menjaga warisan budaya. Pendekatan-pendekatan tersebut cenderung melihat kekuasaan sebagai milik aktor formal seperti Pemerintah atau Ketua Adat, dan belum menyentuh secara mendalam bagaimana kekuasaan bekerja dalam bentuk yang lebih modern dan tersembunyi namun efektif di tingkat masyarakat. Padahal dalam praktiknya, keputusan masyarakat dalam menjalankan atau membatasi sebuah tradisi seperti Festival 7 Kenango muncul melalui rasional Pemerintah terkait dana pada 2024 lalu.

Situasi ini mencerminkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk intruksi langsung, melainkan melalui logika pengelolaan yang memindahkan tanggung jawab kepada masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menerapkan perspektif Foucault melalui teori *governmentality* untuk memahami pelaksanaan tradisi Festival Kenango dari lensa kekuasaan dan pengetahuan lokal. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang menekankan aktor formal, penelitian ini justru melihat bagaimana masyarakat secara sadar



membentuk keputusan berdasarkan rasionalitas yang lahir dari pengetahuan mereka sendiri; seperti nilai-nilai keagamaan, norma adat, serta sosial dalam kesehariannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan pemahaman baru atas dinamika kekuasaan dalam tradisi budaya lokal, tetapi juga memperluas cakrawala teoritis tentang bagaimana kekuasaan modern bekerja secara tersebar, halus, dan produktif dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna pada sejumlah individu maupun sekelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian dari suatu masalah sosial yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental, karena Festival Kenango dijadikan sebagai sarana untuk memahami bagaimana kekuasaan dan pengetahuan bekerja dalam konteks lokal melalui perspektif governmentality. Namun, tak hanya sampai disitu, kasus ini juga memiliki kekhasan lokal dimana pendekatan ini juga memiliki unsur kecil studi kasus intrinsik.

Pendekatan studi kasus merupakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif dengan mendalami mengenai sebuah kasus dengan menganalisis sebuah fenomena melalui banyak sumber, seperti wawancara, observasi langsung terkait 30 dengan tradisi Festival Kenango serta dokumen untuk gambaran data yang komprehensif (Stake: 1995). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana tradisi tersebut berubah atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni Pemerintah. Oleh karenanya, metode ini dinilai relevan untuk memahami serta mempelajari suatu budaya masyarakat melalui perayaan tradisi Festival Kenango.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Jenis dan sumber tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dalam memberikan informasi data kepada peneliti. Data yang kemudian diperoleh dikumpulkan peneliti dari sumber pertama atau lokasi objek penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud ialah data yang bersumber langsung dari informan yang diteliti. Metode 32 atau cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang dianggap sebagai kunci tokoh masyarakat serta informan yang berperan sebagai tokoh pendukung. Dalam hal ini, informan kunci dapat berperan sebagai Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan divisi bidang kebudayaan, sedangkan untuk informan pendukung berperan sebagai ketua adat, serta tokoh masyarakat yang dianggap penting di Kelurahan Kenanga. Data primer yang diperoleh peneliti merupakan data hasil wawancara peneliti bersama dengan para informan



dengan memperkuat dukungan data melalui catatan serta bukti hasil rekaman suara peneliti dengan informan. Kemudian, peneliti akan mencatat hal-hal yang sekiranya dianggap penting yang diperlukan dalam penelitian untuk menjawab perumusan masalah yang telah disampaikan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh sebagai bahan pendukung penelitian melalui individu diluar informan lain ataupun dapat berupa dokumen. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat data primer, seperti dokumen penting, catatan, gambar, serta lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa catatan gambaran tradisi Festival Kenango pada saat tahun terakhir dilaksanakan yang diperoleh melalui arsip dokumen Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, serta dokumen profil Kelurahan Kenanga berupa geografis Kelurahan Kenanga dan Demografi Kelurahan Kenanga yang diperoleh dari kantor Kelurahan Kenanga.

Subjek dan Teknik Penentuan Informan

Subjek merupakan suatu pihak yang ditetapkan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan yang diteliti pada situasi sosial atau dikenal dengan nama informan (Mukhtar, 2013). Dalam penelitian yang akan dilakukan, subjek informan yakni Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagian divisi sejarah dan tradisi. Sedangkan, unit analisisnya ialah kelompok masyarakat Kelurahan Kenanga yang terdiri dari ketua adat, serta tokoh pemangku kepentingan masyarakat.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Creswell (2015), purposive sampling ialah teknik untuk menentukan informan dengan berbagai macam pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut dapat berupa; pihak yang dianggap paling tahu atau ahli mengenai permasalahan, lembaga atau badan yang memuat kebijakan, serta pihak yang dapat memberikan jawaban mengenai pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan teknik penelitian ini dikarenakan apa yang menjadi pertanyaan penelitian memenuhi syarat kriteria mengenai purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasari dengan berbagai macam pertimbangan peneliti untuk menentukan serta memilih sampel yang dianggap sesuai serta representatif. Untuk menggunakan teknik purposive sampling, peneliti menentukan informan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Divisi Kebudayaan (sejarah dan tradisi, pamong budaya, Kepala Bidang Kebudayaan, serta Sekretaris), lalu ada Ketua Adat Kelurahan Kenanga, Lembaga Adat Melayu Bangka bagian Riset, Pak Lurah, 34 Sekretaris Lurah, serta beberapa Masyarakat Kelurahan Kenanga yang semuanya terdiri dari sebelas informan.

Teknik pengumpulan data dan analisis data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: Observasi partisipasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Festival Kenango Pra-Intervensi Kekuasaan

Sebelum membahas mengenai Praktik Kekuasaan Dalam Pelaksanaan Tradisi Festival Kenango, bagian ini akan membahas mengenai pengetahuan lokal dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango, Tradisi Festival Kenango di Kelurahan Kenanga merupakan sebuah manifestasi budaya yang murni lahir dari pengetahuan lokal masyarakat. Festival ini bukan sekedar acara seremonial tahunan, melainkan bentuk konkret dari nilai-nilai spiritual keagamaan, sosial, dan moral yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Kenanga. Pelaksanaan Festival pada masa itu tidak bergantung pada kebijakan atau arahan dari pihak luar, melainkan digerakkan oleh mentalitas masyarakat dalam menjaga hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan antara manusia dan manusia yang termanifestasikan dalam bentuk tradisi leluhur yang sakral dan penuh makna.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama ketua Adat Kelurahan Kenanga, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan Festival Kenango pada masa-masa awal sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat tanpa campur tanga atau bantuan dari Pemerintah.

“Dulu kami melaksanakan festival ini dengan semangat kebersamaan. Semua warga ikut gotong royong, baik yang tua maupun yang muda. Tidak ada dana dari luar, semua dari swadaya masyarakat,” (Wawancara, 21 April 2025)

Festival ini telah hadir lebih dari tiga generasi sebelumnya yaitu 1950-an. Festival ini kemudian mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai warisan budaya sehingga pada tahun 2011 festival ini resmi ditetapkan masuk dalam agenda Pemerintah. Hal ini terbukti dengan sejarah pelaksanaan tradisi yang bermula dari pertemuan antara masyarakat pertanian dan masyarakat pesisir setahun sekali untuk bersilaturahmi dengan memamerkan hasil kekayaan alam melalui arak-arakkan dan diakhiri dengan menyantap hasil alam bersama-sama. Hal inilah yang kemudian mendasari terciptanya pengetahuan lokal melalui praktik keseharian, petuah orang tua, dan nilai-nilai sosial bersama. Dalam konteks ini, pengetahuan lokal tidak tercatat dalam bentuk formal, namun kekuatannya berfungsi sebagai panduan bertindak dalam memaknai identitas kultural masyarakat Kenanga dalam menjalankan kehidupan kesehariannya.

Salah satu aspek paling menonjol dalam Festival Kenango sebelum intervensi Pemerintah adalah dominasi nuansa spiritual dan religius. Kegiatan festival diselenggarakan secara sukarela oleh masyarakat dengan pusat kegiatan di Masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kebudayaan dan interaksi sosial yang mengikat komunitas. Seluruh rangkaian acara, mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ceramah agama, hingga kegiatan sosial seperti bersedekah dan makan bersama, berlandaskan semangat ibadah.

Adapun nilai pahala menjadi konsep penting yang mendasari partisipasi masyarakat dalam Festival Kenango. Berbagai bentuk kontribusi (baik materi, maupun tenaga) dipahami sebagai amalan yang untuk bekal di akhirat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak membutuhkan dorongan eksternal seperti dana hibah atau publikasi media. Mereka tergerak oleh keyakinan religius bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesalehan sosial yang bernilai ibadah. Salah satu tradisi bersedekah, misalnya, bukan dimaknai sebagai kegiatan filantropi yang netral, melainkan sebagai perintah agama yang memiliki dimensi spiritual. Praktik ini



dilakukan dengan penuh kerendahan hati, karena diyakini bahwa rezeki adalah titipan Tuhan yang harus dibagikan, terutama pada momen-momen istimewa seperti festival keagamaan.

Selain landasan keagamaan, Festival Kenango juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai moral sosial, terutama silaturahmi. Dalam pandangan masyarakat Kenanga, silaturahmi bukan hanya aktivitas sosial, tetapi juga kewajiban moral yang harus dijaga dan diperkuat. Oleh karena itu, Festival Kenango menjadi momen penting untuk saling berkunjung, berdamai, dan mempererat hubungan yang renggang, dan memperbarui ikatan sosial antarwarga maupun antarwilayah. Nilai silaturahmi ini juga terlihat dalam cara masyarakat menyambut tamu. Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga kerabat dari luar daerah diundang untuk hadir dan ikut serta dalam suasana kebersamaan. Mereka disugahi hidangan makanan (Kue Bolu Kujo, ayam semur, dan daging) semua ini dilakukan tanpa pamrih, tanpa dorongan materi, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan sesama manusia.

Sikap terbuka, gotong royong, dan kesederhanaan dalam menyelenggarakan festival mencerminkan bagaimana moral sosial telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tanpa organisasi formal atau struktur panitia yang kompleks, festival tetap berjalan dengan baik karena adanya kesepahaman bersama dan pembagian peran secara alami berdasarkan hubungan kekerabatan, usia, dan status sosial dalam komunitas.

Salah satu ciri utama Festival Kenango sebelum intervensi Pemerintah adalah kemandirian komunitas. Tidak ada ketergantungan pada dana hibah, sponsorship, atau program-program Pemerintah. Segala bentuk logistik, konsumsi, hingga dokumentasi ditangani secara swadaya. Sumber daya berasal dari iuran warga, hasil gotong royong, atau sumbangan sukarela. Ini menunjukkan tingkat otonomi lokal yang tinggi serta rasa kepemilikan terhadap tradisi yang dijalankan. Tradisi Festival Kenango memiliki makna yang mendalam karena dijalankan atas dasar nilai-nilai yang diyakini bersama oleh masyarakat. Pelaksanaannya tidak sekadar mewujudkan bentuk nyata dari rasa syukur kepada Tuhan, melainkan momentum untuk memperkuat hubungan spiritual, merekatkan solidaritas sosial dalam rutinitas tahunan. Setiap unsur dalam festival ini mencerminkan keyakinan bahwa menjalin hubungan baik religius maupun tanggung jawab moral dalam menjaga warisan budaya dan menjalin hubungan baik sesama masyarakat yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kenanga.

Dengan demikian, sebelum adanya peran Pemerintah, struktur nilai dalam Festival Kenango tidak dibangun berdasarkan agenda formal atau kebutuhan wisata, tetapi dilatut dengan pengetahuan lokal melalui semangat keagamaan dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Nilai-nilai ini menjadikan festival bukan hanya ajang perayaan, tetapi juga ruang belajar bersama tentang kehidupan yang baik menurut norma Islam dan budaya lokal.

B. Festival Kenango dan Praktik Governmentality

Praktik kekuasaan dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango dianalisis melalui pendekatan teori governmentality yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui larangan atau paksaan, melainkan melalui pengaturan halus terhadap individu dan komunitas yang diwujudkan melalui pembentukan norma (normative), pengawasan (surveillance), dan pengalihan tanggung jawab sosial (responsibilization). Dalam konteks Festival Kenango praktik kekuasaan tersebut



tidak hanya beroperasi melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui perpaduan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern.

1. Normative: Aturan dan Nilai Baru dalam Tradisi Lokal

Normative berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan bekerja melalui nilai, aturan sosial, dan moral kolektif yang diakui sebagai hal yang wajar. Dalam Festival Kenango, terdapat beberapa aktor pendukung pelaksanaan kegiatan seperti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka serta masyarakat Kelurahan Kenanga. Melalui normative, segala bentuk kegiatan Festival Kenango sudah tersusun rapi melalui aturan dan norma yang berlaku. Pengakuan atas tradisi lokal seperti Festival Kenango tidak hanya berdasar pada nilai kultural masyarakat, berikut beberapa poin penting dalam Perbup No 4 Tahun 2017 yang relevan dengan konteks Festival Kenango:

1) Legitimasi hukum Melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Bangka. Dalam peraturan ini, sejumlah ketentuan secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar legal bagi pelaksanaan Festival Kenango. Festival Kenango merupakan bentuk praktik budaya yang mencerminkan kekayaan adat istiadat masyarakat Kenanga, seperti Nganggung, ceramah keagamaan, syukuran, dan silaturahmi.

2) Perencanaan Kegiatan Praktik ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan n. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan membina adat istiadat tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf d, yang dalam praktiknya terwujud melalui kolaborasi antara masyarakat. Kebijakan ini diterapkan secara nyata melalui penyusunan agenda dan alokasi anggaran oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dalam Buku Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dalam wawancara pada 11 Juni 2025, Pak Putra Jaya, S.Ag, selaku Sekretaris DINPARBUD menyatakan:

“Memang kalo dari kami tuh, untuk anggaran terkait perayaan festival kebudayaan telah tersusun setiap setahun sekali. Untuk anggaran paling besar yaitu maulid yang biasanya di Kemuje, lalu perayaan muharam di Kenanga, baru lah kegiatan lain kayak njuh jerami, rebo kasam tuh. Semua itu tersusun dalam dokumen data perencanaan Dinparbud, dalam Rencana Strategis terbagi dalam beberapa tahun. Anggaran itu diperoleh melalui APBD Kabupaten Bangka, yang kemudian di salurkan ke kami, kemudian bagian tim anggaran kami menyesuaikan skala prioritas DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang dapat berubah tiap tahun sesuai dengan kondisi yang ada”. (wawancara, 11 Juni 2025).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Putra Jaya, S.Ag selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, anggaran kegiatan kebudayaan, termasuk festival yang diselenggarakan di Kelurahan Kenanga, telah disusun secara rutin setiap tahun. Dalam praktiknya, pengalokasian dana ini merujuk pada perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dinas yang tercantum dalam Rencana Strategis yang dibagi dalam beberapa tahun.

Anggaran kegiatan kebudayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka yang kemudian disalurkan kepada dinas terkait. Selanjutnya, tim bagian keuangan dari Disparbud akan menyesuaikan besaran dana berdasarkan skala prioritas yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Perlu



dicatat bahwa besaran anggaran ini bersifat fleksibel dan dapat berubah setiap tahun, tergantung pada kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.

3) Pengetahuan Modern Berorientasi Pada Pengetahuan Lokal Pengetahuan lokal dalam Festival Kenango termanifestasi melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah, doa bersama, pengajian serta lomba-lomba Islam mencerminkan nilai spiritual dan sosial masyarakat setempat. Seiring waktu, pengetahuan modern yang dibawa oleh institusi Pemerintah, terutama dalam bentuk promosi pariwisata berbasis budaya lokal, mulai berorientasi pada pengetahuan lokal ini. Pemerintah mengangkat unsurunsur tradisi dalam bingkai pariwisata dan pembangunan, menjadikannya sebagai bagian dari strategi branding daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf g yang mendorong agar kegiatan adat seperti Festival Kenango diikutsertakan dalam event-event strategis daerah, dan hal ini terealisasi saat festival tersebut menjadi bagian dari kalender wisata budaya Kabupaten Bangka sebagai salah satu bentuk wisata religi berbasis kearifan lokal (Nganggung, Ceramah Agama, dan Syukuran). Pernyataan dari Pihak Dinas menjelaskan bahwa:

“Jadi, bagi mereka itu puncak perayaan meriah hanya ada di masjid, itulah puncaknya Muharam. Kalau misalnya dari acara itu paling hanya sekedar untuk silaturahmi, tapi dari mereka pokoknya maunya inti perayaan puncaknya di acara masjid itu tetap ada”. (wawancara, 29 April 2025).

Dari pernyataan wawancara tersebut, norma keagamaan serta nilai spiritualitas menjadi acuan sosial untuk melaksanakan tradisi ini. Adanya transformasi bentuk perayaan dalam konteks Festival Kenango, yang semula masyarakat merayakan kegiatan besar di luar masjid, menunjukkan bahwa norma baru telah diinternalisasi melalui bentuk sederhana dengan makna spiritual yang tetap ada

Konsep normative menurut Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja bukan hanya melalui larangan maupun paksaan, tetapi melalui pembentukan nilai, aturan sosial, dan moral yang diterima sebagai hal wajar oleh masyarakat. Kekuasaan yang bekerja melalui normative bersifat tak kasat mata, tetapi tetap kuat mengakar dalam kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kekuasaan dalam bentuk normative tampak bekerja secara efektif dan halus, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan nilai baru yang mengatasnamakan kebersamaan, pengetahuan lokal seperti (Nganggung, syukuran, dan ceramah agama tetap ada bukan karena adanya larangan atau tekanan dari luar, tetapi karena nilai itu sudah menjadi bagian dari struktur kesadaran kebersamaan mereka. Proses ini mencerminkan kerja kekuasaan yang tidak menindas, tetapi terbentuk dari struktur kemungkinan melalui tindakan masyarakat dalam pembentukan norma yang tampak wajar dan rasional.

2. **Surveillance: Pengawasan sebagai Teknik Kekuasaan Tidak Langsung**

Surveillance dalam konteks pemerintahan modern tidak selalu hadir dalam bentuk pengawasan fisik atau aparat represif. Foucault menyebutkan bahwa pengawasan dapat bekerja melalui mekanisme yang tampak netral seperti administrasi dan dokumentasi. Selain itu, pengawasan juga dapat dipadukan dengan pengetahuan lokal dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango. Bentuk pengawasan tersebut muncul melalui kewajiban pelaporan, dokumentasi, dan pengajuan bentuk secara formal oleh masyarakat kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Dalam Festival Kenango, pengawasan hadir melalui dua



jalur yang saling beriringan: jalur administratif dari Pemerintah dan jalur sosial-kultural dari masyarakat lokal. Kedua bentuk pengawasan ini tidak berjalan terpisah, tetapi saling melengkapi dalam memastikan tradisi tetap berlangsung sesuai nilai dan norma yang berlaku.

3. **Responsibilization: Masyarakat Sebagai Pengelola Tradisi Konsep**

responsibilization dalam teori governmentality Foucault menggambarkan suatu kondisi di mana Pemerintah tidak lagi sepenuhnya mengatur secara langsung, tetapi mendorong masyarakat untuk mengambil tanggung jawab terhadap pengelolaan urusan sosial secara mandiri. Dalam konteks Festival Kenango, mekanisme ini tampak jelas ketika masyarakat secara aktif mengambil alih proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tradisi tanpa menunggu instruksi formal dari Pemerintah Daerah.

Kondisi ini bermula tidak adanya alokasi dana pada tahun 2024, yang tercatat sebesar nol rupiah. Ketidakhadiran anggaran tersebut bukan tanpa sebab, melainkan sebagai dampak dari penyesuaian fiskal yang dilakukan Pemerintah Daerah akibat ketidakstabilan fiskal daerah karena gejala sektor sumber daya, khususnya di sektor ekonomi unggulan. Situasi ini menyebabkan banyak program non-prioritas, termasuk kegiatan kebudayaan, harus dikurangi bahkan ditiadakan sementara waktu, sebagaimana dijelaskan oleh pihak dinas:

“Nah kalo kemarin itu kami sampaikan bahwa kami bilang kami enggak bisa bantu karena tidak punya anggaran. Nah itu benar benar dampaknya sangat terasa, karena apa mereka itu perayaan paling meriah muharam itu dari pemerintah.. Jadi bagi mereka, perayaan itu meriah di masjid tuh, itu lah puncaknya muharam itu. Kalau misalnya dari acara itu paling hanya untuk silaturahmi, tapi mereka intinya mau dipuncaknya di acara itu. Kita sendiri tentu tau kalau muharam itu hanya ada di Bangka Belitung hanya ada di Kelurahan Kenanga. Maka tidak mungkin masyarakat sanggup menerima tamu yang keberadannya bukan hanya dari satu daerah”. (wawancara, 29 April 2025).

Ketiadaan dana dari Pemerintah Daerah pada tahun 2024 menjadi momen penting yang menandai perubahan dalam mentalitas masyarakat Kelurahan Kenanga. Dalam kerangka responsibilization, masyarakat secara perlahan diarahkan untuk mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tradisi secara mandiri, tanpa adanya dukungan struktural dari Pemerintah. Hal ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berpartisipasi, tetapi juga menggeser cara berpikir mereka terhadap makna Festival Kenango. Jika sebelumnya festival dimaknai sebagai ajang spiritual dan sedekah, di mana warga berbagi makanan dan membuka rumah bagi tamu sebagai bentuk solidaritas dan ibadah, ketiadaan dukungan dari Pemerintah justru mendorong sebagian warga mereduksi makna tersebut menjadi beban yang harus dihitung secara ekonomis. Masyarakat tidak lantas menyalahkan Pemerintah, melainkan melakukan refleksi dan musyawarah untuk merumuskan bentuk festival yang sesuai dengan kondisi mereka. Dalam hal ini, Pemerintah bekerja menggunakan teknologi sosial, yaitu serangkaian mekanisme administratif (anggaran, perencanaan, prioritas program) yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengelola diri sendiri.

Ketua Adat Kelurahan Kenanga, Bapak Salman Saleh, menjelaskan:

“Awalnya itu masyarakat kenango mengeluh ke ketua RT masing-masing lantaran merasa berat untuk mengundang orang. Kita tau sendiri bagaimana ekonomi di bangka ini lagi bermasalah.. Dari ketua RT itu menyampaikanlah ke aku nih, terkait tadi. Banyak sekiranya



ada lima ketua rt yang ngadu ke ku hal yang sama.. Dari kemudian dilakukan musyawarah dengan rt rt, lurah, kepala adat, serta pengurus mesjid tadi. Dari musyawarah itu, sepakatlah masyarakat untuk tidak diwajibkan mengundang orang lagi tahun 2025 nih, tapi kami tetap melakukan perayaan besar di mesjid.. Dari sini kemudian kami nyampain ke dinas”. (wawancara, 21 April 2025).

Dari Penjelasan diatas menjelaskan bahwa masyarakat Kenanga menyesuaikan tradisi mereka dengan kemampuan dan kondisi aktual, tetapi tetap menjaga nilai-nilai inti. Dalam bentuk festival yang lebih sederhana; ceramah agama, Nganggung ,dan lomba islami tetap dipertahankan, karena dianggap sebagai inti sakral dari perayaan muharam. Bahkan, sebagian warga tetap membuka pintu untuk silaturahmi sebagai bentuk ikatan simbolik, meski secara umum kegiatan jamuan besar ditiadakan.

Ketiadaan dana pada pelaksanaan Festival Kenango tahun 2024 menjadi momentum penting yang menunjukkan bagaimana masyarakat Kenango menjalankan responsabilization secara nyata. Tanpa dukungan finansial dari pemerintah, masyarakat tidak membatalkan tradisi secara total, melainkan melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi mereka. Melalui proses tersebut, masyarakat secara sadar memutuskan untuk tetap melaksanakan inti kegiatan keagamaan di masjid, tetapi tidak mengundang masyarakat umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini lahir bukan dari instruksi Pemerintah, melainkan dari kesadaran berbasis pengetahuan lokal, seperti nilai gotong royong, rasa tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Dalam perspektif governmentality, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak perlu hadir secara langsung untuk mengatur perilaku warganya. Masyarakat telah memiliki mekanisme pengaturan diri yang efektif, di mana keputusan sosial diambil melalui musyawarah dan dipandu oleh nilai-nilai yang mereka bangun sendiri. Dengan kata lain, ketiadaan dana Pemerintah justru memunculkan kerja teknologi sosial, di mana masyarakat mengelola dirinya melalui norma lokal yang telah terinternalisasi. Kemudian, Praktik responsabilization dalam konteks Festival Kenango tampak jelas dari bagaimana masyarakat tetap mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tradisi. Pada tahun sebelumnya, di mana ketiadaan dana dari Pemerintah, sebagian masyarakat tetap mengundang orang-orang untuk bertamu walaupun dalam skala kecil dan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelestarian tidak sepenuhnya tergantung dari Pemerintah. Justru dalam situasi tanpa dukungan institusional inilah responsabilization bekerja paling nyata, di mana masyarakat tidak menunggu instruksi dari atas, tetapi secara otonom mengorganisir, menyesuaikan skala, dan memastikan keberlangsungan tradisi sesuai kemampuan mereka. Ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak bekerja melalui paksaan, melainkan melalui pembentukan mentalitas warga untuk menjadi subjek yang bertanggung jawab atas budaya mereka sendiri.

C. Perubahan Praktik Budaya Festival Kenango

Perubahan bentuk pelaksanaan Festival Kenango tidak dapat dilepaskan dari hadirnya teknologi dominasi yang dijalankan secara halus oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme efisiensi anggaran. Pada tahun 2024, kegiatan Festival Kenango tidak memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka. Absennya dukungan ini berasal bukan karena larangan eksplisit, melainkan akibat rasionalisasi belanja



daerah di tengah ketidakstabilan pendapatan dari sektor ekonomi unggulan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam pikiran masyarakat, yang pada akhirnya memicu pergeseran mentalitas: dari bergantung pada Pemerintah menjadi bertumpu pada evaluasi internal dan musyawarah lokal.

Efisiensi anggaran mendorong masyarakat Kelurahan Kenanga untuk bermusyawarah bersama Ketua Adat, RT, Lurah, dan Pengurus Masjid. Hasilnya disepakati bahwa perayaan akan difokuskan di masjid tanpa keharusan mengundang masyarakat umum setiap tahun, cukup dilakukan dua tahun sekali. Dalam kerangka governmentality, keputusan ini menunjukkan bahwa kekuasaan Pemerintah tidak lagi hadir secara langsung sebagai pengatur, tetapi sebagai fasilitator dan legitimasi simbolik. Masyarakat mengambil alih tanggung jawab penuh sebagai subjek yang mengatur dirinya sendiri dan menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi.

Transformasi ini berdampak langsung pada makna sosial dan bentuk perayaan. Festival Kenango kini berlangsung secara terbatas di lingkungan internal Kelurahan Kenanga, tidak lagi bersifat terbuka seperti sebelumnya. Momen silaturahmi antarkampung yang dulunya menjadi ciri khas festival pun tergantikan oleh kegiatan yang bersifat lokal dan spiritual. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian nilai, di mana tradisi tetap dijalankan namun tidak lagi dalam bentuk yang sama. Praktik silaturahmi dan sedekah digantikan dengan fokus pada ceramah agama, pengajian, serta lomba Islam yang diselenggarakan di masjid. Namun, perubahan mentalitas ini juga menciptakan jarak terhadap nilai-nilai lokal yang sebelumnya menjadi inti dari perayaan. Ikatan spiritual yang dahulu menjadi penggerak utama mulai melemah, seiring dengan bergesernya partisipasi menuju individual atau kelompok kecil. Tradisi keagamaan yang dulunya penuh semangat dan emosional berubah menjadi rutinitas formal. Fragmentasi sosial pun tak terhindarkan: sebagian masyarakat tetap ingin mempertahankan semangat festival seperti dulu, sebagian lain menolak pelaksanaan karena keterbatasan dana, dan ada pula yang memilih memperkecil skala kegiatan hanya di lingkup keluarga atau RT. Dalam konteks ini, responsabilization tidak hanya memindahkan beban teknis dari Pemerintah ke masyarakat tentang makna, prioritas dan tanggung jawab atas warisan budaya mereka sendiri.

Meski terjadi penyempitan bentuk, Festival Kenango tetap dijalankan dalam versi yang lebih sederhana dan religius. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat mampu mereformulasi tradisi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anggap relevan, tanpa harus kehilangan esensi dan identitas budaya yang mereka miliki sejak awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam pelaksanaan tradisi Festival Kenango, kekuasaan dan pengetahuan bekerja melalui praktik aturan, pengawasan, dan pengalihan tanggung jawab sosial. Praktik kekuasaan dalam Festival Kenango memperlihatkan bagaimana aturan tidak hanya datang dari pemerintah dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga dari masyarakat sendiri melalui pengetahuan lokal yang mereka warisi dan kembangkan. Dari sisi pemerintah, Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Kesenian, Adat, dan Tradisi memberikan legitimasi hukum



bahwa pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, peraturan ini bersifat umum dan tidak secara khusus mengikat bentuk atau model pelaksanaan Festival Kenango. Dalam ruang kosong itulah, masyarakat menggunakan pengetahuan lokal seperti tradisi mengundang masyarakat umum dan mengadakan syukuran sebagai dasar untuk mengatur sendiri bagaimana festival dijalankan setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam kerangka governmentality tidak hanya mengatur melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui regulasi tak tertulis berbasis tradisi dan nilai-nilai lokal.

Pengawasan dalam pelaksanaan Festival Kenango juga memperlihatkan dua wajah: dari atas dan dari dalam. Pemerintah memang tidak melakukan kontrol langsung, tetapi tetap terlibat melalui mekanisme pendataan, dukungan dana, dan promosi festival dalam kanal resmi seperti media sosial. Ini adalah bentuk soft surveillance, di mana pemerintah tetap mengamati dan membentuk narasi tentang keberlanjutan tradisi. Di sisi lain, masyarakat juga mengawasi diri mereka sendiri melalui musyawarah dan evaluasi internal. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi, kebutuhan kolektif, serta keberlanjutan sosial saat memutuskan untuk tidak mengundang masyarakat luar pada tahun 2024. Tindakan ini mencerminkan bentuk pengawasan berbasis kesadaran yang lahir dari dalam komunitas, bukan karena paksaan eksternal. Dalam konteks governmentality, inilah wujud pengawasan modern yang tidak terlihat sebagai penindasan, tetapi sebagai hasil dari rasionalitas dan norma yang diinternalisasi.

Pengalihan tanggung jawab sosial dalam Festival Kenango tampak jelas pada tahun 2024 ketika pemerintah daerah tidak dapat menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan festival secara terbuka. Absennya dana dari pemerintah bukan berarti festival dihentikan, tetapi menjadi titik balik di mana masyarakat mengambil alih kendali penuh atas keberlanjutan tradisi. Melalui musyawarah internal, warga Kelurahan Kenanga memutuskan untuk tetap menjalankan unsur inti festival seperti kegiatan keagamaan di masjid, namun tidak mengundang masyarakat umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini tercipta lantaran menimbulkan polemik di tengah masyarakat lantaran dari Pemerintah tidak menyalurkan dana membuat masyarakat ragu untuk melanjutkan tradisi, tetapi juga hasil dari proses berpikir kolektif dan rasional, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi logika tanggung jawab atas dirinya sendiri. Inilah bentuk nyata dari governmentality ketika kekuasaan bekerja bukan melalui perintah langsung, tetapi melalui situasi yang mendorong masyarakat untuk secara sukarela mengambil peran sebagai pengelola tradisinya, tanpa perlu dikendalikan secara eksplisit oleh Pemerintah.

Festival Kenango kini berada di titik persimpangan antara pelestarian nilai dan penyesuaian terhadap realitas sosial. Masyarakat menjadi subjektif yang mengelola, menafsirkan ulang, dan menyusun kembali praktik budaya sesuai konteks zaman. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui larangan, melainkan struktur kemungkinan melalui apa yang dibiayai dan apa yang tidak. Inilah bentuk kerja kekuasaan dijelaskan Foucault; kekuasaan yang membentuk, menata, dan membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri melalui norma dan rasionalitas yang dianggap wajar.

Dengan demikian, perubahan Festival Kenango bukan bentuk kemunduran budaya, melainkan strategi bertahan dan beradaptasi. Tradisi tetap dijaga, meski dalam bentuk



minimalis. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang tidak tampak secara langsung seperti kebersamaan, dan identitas komunitas, tidak luntur dalam transformasi ini.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Terkhususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan dapat menyusun mekanisme pendanaan yang tidak hanya bersifat insidental, tetapi berbasis kebutuhan nyata masyarakat dengan transparansi dan kejelasan skema alokasi. Dukungan finansial sebaiknya disesuaikan dengan skala dan karakter tradisi, serta memperhatikan kesinambungna pelestariannya. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, terkhususnya generasi muda dalam memamanajemen acara, pelestarian nilai budaya, serta pengelolaan teknis kegiatan agar tradisi tidak melulu bergantung penuh pada Pemerintah. Selain itu, Pemerintah dapat mempromosikan budaya ini hingga ke tingkat Nasional.
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Kenanga, Terkhususnya penting untuk terus menjaga dan menguatkan nilai-nilai inti tradisi, seperti solidaritas sosial, spiritualitas, dan kebersamaan. Musyawarah yang telah menjadi fondasi pengambilan keputusan selama ini perlu terus dilestarikan agar transformasi tradisi selalu didasarkan pada kesadaran bersama bukan paksaan luar. Dalam situasi minim anggaran sekalipun, masyarakat telah membuktikan bahwa tradisi tetap bisa dijalankan dengan cara sederhana namun bermakna. Ini menjadi kekuatan budaya yang harus dijaga dan diwariskan. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat, seperti tata cara pelaksanaan Nganggung, makna simbolik makanan tradisi hingga etika dalam menerima tamu, adalah bentuk kekayaan budaya yang tidak tertulis namun sangat efektif dalam menjaga struktur sosial. maka dari itu, pelestarian tradisi haru selalu berakar pada pengetahuan lokal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriza. (2020). Analisis Civic Culture Dalam Tradisi Nganggung Dulang (Studi Kasus di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Induk). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Pasundan: Bandung). Diperoleh dari : <http://repository.unpas.ac.id/49917/>
- Foucault, M. (2017). Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Narasi.
- Modules on Foucault: II : Panoptic And Carceral Society. Diperoleh dari: https://www-cla-purduedu.translate.goog/academic/english/theory/newhistoricism/modules/foucaultcarceral.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=In%20particular%2C%20Foucault%20explores%20the,internalized%20and%20directed%20to%20th



Rahargo, A. (2019). Kue Bolu Koju Raksasa Masuk Rekor Muri. Artikel, Kumparan.com.
Diperoleh dari: <https://m.kumparan.com/babelhits/kue-bolukoju-raksasa-masuk-rekor-muri-1rmKgbJxYDY>

Robbins, Judge. (2007). Organizational Behavior. Prentice Hall.